TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1070 K/PDT.SUS-PHI/2018)
REZKI OCEANO WARTONO, Prof. Dr., Ari Hernawan, S.H., M.H.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1070 K/PDT.SUS-PHI/2018)

Oleh:
Rezki Oceano Wartono[1] dan Ari Hernawan[2]

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Putusan Nomor 1070 K/Pdt.SUS-PHI/2018 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas keadilan dalam Putusan Nomor 1070 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu dalam masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative (doktriner), mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (*legis positivis*). Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah studi kasus terhadap putusan *inkracht*. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data berupa bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Putusan Nomor 1070 K/Pdt.SUS-PHI/2018 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketegakerjaan khususnya yang mengatur mengenai upah proses, hak- hak yang tertunda, uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Upah yang dijadikan dasar tidak sesuai ketentuan sehingga kalkulasi total tidak sesuai ketentuan. Uang Pesangon hanya dikabulkan 1x ketentuan, seharusnya 2x ketentuan. Kedua, putusan 1070 K/Pdt.SUS-PHI/2018 belum sepenuhnya menerapkan asas keadilan karena lebih berpihak pada pengusaha

Kata kunci:pemutusan hubungan kerja,pesangon,upah proses,keadilan,kepastian hukum

[1] Mahasiswa Ilmu Hukum , FH UGM.
[2] Guru Besar Hukum Perburuhan, FH UGM.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1070 K/PDT.SUS-PHI/2018)
REZKI OCEANO WARTONO, Prof. Dr., Ari Hernawan, S.H., M.H.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://repository.ugm.ac.id/

LEGAL ANALYSIS RELATED TO WORK TERMINATION REVIEWED BY REGULATION NUMBER 13 TAHUN 2003 ON THE SUBJECT OF EMPLOYMENT (STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1070 K/PDT.SUS-PHI/2018)

By:
Rezki Oceano Wartono[3] and Ari Hernawan[4]

The objective of this research is to define and analyze the conformity of Verdict Number1070 K/Pdt.Sus-PHI/2018. With The Regulation Number 13 Year 2003 on the subject of Employment. The secondary objective is to recognize and analyze the implementation of principle of justice in Verdict Number 1070 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

This research is a descriptive research aiming to acquire the complete description of legal circumstances in particular teritory, or particular legal phenomenon taking place in society. The type of this research is normative legal research (doctrinaire) reviewing the implementation of the principles and values in positive legal (legis positive). The approach applied in this research is the case study concerning inkracht verdict. Data acquired from literature review is necessary.

Based on the result of the study, it can be concluded that: Firstly, Verdict Number 1070 K/Pdt.Sus-PHI/2018. Is not accordance with Regulation Number 13 Year 2003 on the subject of Employment especially addressing the regulation of process wages, the pending rights, severe payments, award payment during years of service, and the payment for right compensation because the severance payment is only granted once provisions that should be twice provision. Secondly, the impelementation of justiceon in Verdict Number Number1070 K/Pdt.Sus-PHI/2018 can be fully achieved. Thus make inconsistency on the sprit of providing right protection on employees on Verdict Number Number1070 K/Pdt.Sus-PHI/2018 haven't fully achieved fairness because still on employer side.

Keywords: termination of employment relationship, severance pay, process wage, legal security, fairness

[3] Undergraduate Law Student, Faculty of Law,UGM
[4] Professor of Labour Law, Faculty of Law,UGM